

## Analisa Permasalahan Pengadaan Tanah dan Dampak Sosial Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung (Studi Kasus di Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian Kota Bitung)

Suraji<sup>1\*</sup>, Noudy R.P. Tendean<sup>2</sup>, Hestiwati Basir<sup>3</sup>, Adelia A<sup>4</sup>, Ashifa Z.W<sup>5</sup>,  
KMS Ramadhan D<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Insititut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Utara

\*Correspondence: suraji1772@gmail.com; Jl. Tampusu, Remboken, Kabupaten Minahasa, 95681, Indonesia

Received: 28-09-2022; Accepted: 21-11-2022 ; Published: 21-11-2022

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan pengadaan tanah dan dampak sosial pada pembangunan jalan tol Manado-Bitung (Studi kasus di Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian Kota Bitung). Metode yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, survei dan dokumentasi. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data model Bogdan dan Biklen yang meliputi organisasi data, generalisasi katagori data penarikan atau penetapan tema dan pola, penetapan hipotesis dari data dan menetapkan berbagai alternatif data yang lain atau teori-teori yang relevan untuk analisis data. Hasil peneltian yaitu ditemukan adanya permasalahan pada pengadaan tanah tetapi pelaksanaannya sudah sesuai ketentuan peraturan per-undang-undangan yang berlaku dan telah dapat mencapai tujuannya yaitu memperoleh tanah/lahan yang dibutuhkan, juga terdapat adanya dampak sosial berupa perubahan lingkungan sosial, gangguan terhadap aktivitas warga masyarakat dan rendahnya kesempatan bekerja pada proyek. Dalam konsep pembangunan menurut Raharjo (2013 :35), tujuan pembangunan adalah menciptakan kemajuan sosial ekonomi secara berkesinambungan dengan tidak mengabaikan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan masyarakat secara keseluruhan. Pada pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat tetapi perlu memperhatikan adanya perubahan sosial sebagai dampak pengadaan tanah dan pembangunan sehingga pemerintah dapat mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi.

**Kata Kunci:** Pembangunan Jalan Tol; Pengadaan Tanah; Dampak Sosial

**Abstract:** *This researh aims to describe and analyze the problem land acquisition problems and the social impacts to the toll road construction of Manado-Bitung (a case study in Girian Permai Subdistrict, Girian City, Bitung). The method used is a qualitative approach method. The data collection technique used are observation, interview, surveys and documentation. The data analysis techniques used in this study are the Bogdan and Biklen model data analysis methods which include data organization, generalization of data categories or determination of themes and patterns, determination of hypotheses from data and establishing various other data alternatives or theories relevant for data analysis. The results of the research found that there were problems in land acquisition but the implementation was in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations and has been able to achieve its goal of obtaining the required land / land, there are also social impacts in the form of changes in the social environment, disruption to the activities of community residents and low opportunities to work on projects. In the concept of development according to Raharjo (2013:35), the goal of development is to create sustainable socio-economic progress by not neglecting rights and upholding the principles of justice of society as a whole. The construction of the Manado-Bitung Toll Road aims to increase the economic growth of the community but it is necessary to pay attention to social changes as a result of land acquisition and development activities so that the government can overcome various problems that occur.*

**Keywords:** *Toll Road Construction; Land Acquisition; Social Impact*

## 1. Pendahuluan

Pembangunan nasional yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia mandiri, berkepribadian dan berdaulat membutuhkan suatu penuntun atau pedoman dalam melaksanakan pembangunan yang saat ini dikenal dengan sebutan Nawa Cita sebagai visi pembangunan. Ada 9 (sembilan) agenda program prioritas pembangunan yang dalam implementasinya ditetapkan 5 (lima) prioritas program pembangunan yakni pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, mengundang investasi, melakukan reformasi birokrasi dan menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Mencermati 5 (lima) prioritas utama pembangunan tersebut maka pembangunan infrastruktur adalah prioritas utama karena merupakan pondasi utama bangsa Indonesia untuk bersaing dengan negara lainnya.

Provinsi Sulawesi Utara yang terletak di Pasifik Rim memiliki letak yang strategis karena berhadapan langsung dengan negara-negara Asia Timur dan Pasifik. Kondisi ini didukung oleh potensi yang dimilikinya untuk dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Potensi yang dimiliki diantaranya yaitu produksi perikanan seperti tuna dan cakalang, hasil perkebunan seperti cengkeh pala, kelapa juga produksi pertanian dan ada pertambangan. Potensi yang tidak kalah pentingnya yaitu potensi pariwisata yaitu super destinasi wisata nasional dengan destinasi wisata unggulan yaitu Kawasan Bunaken dan Kawasan Likupang. Hal ini juga didukung oleh keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung dan Pelabuhan Internasional Bitung. Namun demikian dirasakan masih adanya berbagai masalah seperti masalah transportasi darat yang belum optimal. Kebutuhan ini kemudian melahirkan ide pembangunan jalan tol Manado-Bitung dalam rencana strategis pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Seiring dengan pembangunan nasional yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur, rencana pembangunan jalan tol Manado-Bitung mendapat persetujuan dari pemerintah pusat dengan nilai investasi mencapai Rp 5,12 Triliun. Proyek jalan tol Manado-Bitung ini diharapkan dapat mendukung peningkatan lalu lintas Manado-Bitung, mendukung sektor pariwisata serta pertumbuhan ekonomi di Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung serta Provinsi Sulawesi Utara pada umumnya.

Rencana pembangunan jalan tol Manado-Bitung selesai pada tahun 2020, namun kenyataannya rencana tersebut tidak berjalan sesuai rencana karena sampai akhir Triwulan I Tahun 2021 belum selesai. Molornya pembangunan ruas jalan tol ini tidak terlepas dari berbagai kendala yang ada. Kendala yang terjadi diantaranya terkait permasalahan pengadaan tanah dan adanya komplain sebagian masyarakat terhadap berbagai dampak sosial akibat

pembangunan jalan tol Manado-Bitung. Permasalahan yang diakibatkan sebagai dampak pembangunan jalan tol banyak terjadi dan beberapa penelitian mengenai masalah pembangunan jalan tol dan dampaknya diantaranya yaitu penelitian oleh Vina Maria Ompusunggu tentang dampak pembangunan infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo Sumatra Utara. Hasil penelitian menunjukkan terdapat adanya dampak positif dan dampak negatif dalam pembangunan infrastruktur jalan yang merugikan masyarakat. Sedangkan pada penelitian Victorianus Aries dkk tentang dampak pembangunan jalan tol terhadap faktor sosial ekonomi dan lingkungan pada usaha batik dan perhotelan di Kota Pekalongan menemukan adanya permasalahan pada pembebasan lahan dan adanya dampak kemunduran ekonomi para pelaku usaha bahkan terancam berhentinya usaha perhotelan maupun batik.

Pada penelitian Uswatun Khasanah dkk tentang dampak pembangunan jalan tol Solo-Kertosono terhadap hak ekonomi masyarakat desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi hasilnya adalah terdapatnya berbagai dampak negatif pembangunan jalan tol seperti penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan, hilangnya akses dan polusi. Berbagai permasalahan dan dampak pada penelitian-penelitian ini sangat mungkin terjadi pada pembangunan jalan tol Manado-Bitung khususnya di wilayah Kota Bitung yang sebagian besar melewati perumahan warga masyarakat. Apakah pada pembangunan jalan tol Manado-Bitung terdapat permasalahan pengadaan tanah dan memiliki dampak sosial bagi warga masyarakat? Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apa saja permasalahan pada kegiatan pengadaan tanah dan dampak sosial terhadap warga masyarakat yang terdampak langsung pembangunan jalan tol Manado-Bitung. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa permasalahan pengadaan tanah dan dampak sosial bagi warga masyarakat yang terdampak pada Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung khususnya di Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian Kota Bitung.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dari informan yaitu: Camat Girian, Kasi Pemerintahan dan Pertanahan, Lurah Girian Permai, Sekretaris Lurah, Pejabat terkait pada Kantor Pertanahan Kota Bitung, Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Pengadaan Tanah dan warga masyarakat. Penentuan informan ini yaitu secara purposive yaitu adanya pertimbangan bahwa informan yang dipilih menguasai permasalahan penelitian dan memiliki data yang dibutuhkan. Fokus pertanyaan untuk informan Camat Girian yaitu bagaimana pihak pemerintah kecamatan dan pemerintah

kelurahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dapat berperan dalam pengadaan tanah dan mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi. Fokus pertanyaan untuk Lurah Girian Indah yaitu bagaimana proses pengadaan tanah di wilayah kelurahan dan apa saja permasalahan yang terjadi di lapangan serta dampak perubahan sosial yang dialami warga. Fokus pertanyaan untuk PPK Pengadaan Tanah apa saja permasalahan pada pengadaan tanah dan upaya penyelesaiannya. Fokus pertanyaan untuk Kepala Bidang Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Bitung yaitu tentang mekanisme penyelesaian permasalahan pembebasan tanah. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian adalah wawancara, observasi, survei dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data model Bogdan dan Biklen yang meliputi organisasi data, generalisasi kategori data penarikan atau penetapan tema dan pola, penetapan hipotesis dari data dan menetapkan berbagai alternatif data yang lain atau teori-teori yang relevan untuk analisis data.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Permasalahan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol**

Dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Manado-Bitung khususnya di wilayah Kota Bitung dibentuk Panitia Pengadaan Tanah. Pembangunan jalan tol Manado-Bitung khususnya yang melintasi wilayah Kota Bitung yaitu Seksi 2 B Main Road (STA 25.500 sd STA 39.900) sepanjang 13,5 kilo meter dan pengadaan tanah dengan luas lahan yang dibebaskan yaitu 1.789.295 meter persegi dengan jumlah bidang 1.735. Lahan yang dilintasi jalan tol dan prasarana jalan tol lainnya yaitu 6 wilayah kecamatan dan 20 wilayah kelurahan. Kecamatan Girian merupakan salah satu wilayah yang dilewati proyek pembangunan jalan tol dan salah satu kelurahan di Kecamatan Girian yaitu Girian Permai. Proses kegiatan pengadaan tanah melalui tahapan yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil.

Mengenai permasalahan dalam pengadaan tanah yang terjadi pada umumnya yaitu (1) Permasalahan harga ganti rugi yang ditawarkan, (2) Permasalahan status tanah, (3) Permasalahan perbedaan hasil ukur lahan dan penetapan batas bidang tanah/sengketa batas, (4) Adanya perbedaan besaran ganti rugi antar bidang tanah, (5) Permasalahan pada proses pembayaran, (6) Adanya beberapa prasarana umum yang terkena pembebasan tanah seperti Gereja dan Mesjid. Selain itu juga adanya dinamika kasus yang cukup menyita perhatian khalayak yaitu adanya sumber mata air yang dilintasi proyek.

Selain itu permasalahan pada pengadaan tanah yaitu keluhan mengenai proses pemberian ganti rugi. Pemberian ganti rugi memang sudah dilakukan melalui musyawarah tetapi yang dikeluhkan oleh warga yaitu besaran ganti rugi yang dianggap terlalu rendah. Setelah banyak keberatan oleh warga baru dinaikkan harganya. Keluhan lain dalam pemberian ganti rugi yaitu prosesnya yang lama sehingga menyebabkan timbulnya kesulitan-kesulitan yang dialami oleh warga karena ada biaya yang harus dikeluarkan untuk beberapa keperluan sementara belum mendapat ganti rugi.

## **B. Dampak Sosial Akibat Pembangunan Jalan Tol Manado- Bitung**

Sesuai penjelasan dari pihak Pemerintah Kelurahan Girian Permai jumlah warga yang terdampak di wilayahnya sekitar 90-an KK. Adapun tanah yang terkena pembebasan sebagian besarnya adalah berupa rumah perumahan warga, sebagian kecil pekarangan atau kebun kosong. Berbagai permasalahan yang dialami oleh warga di sekitar lokasi pembangunan sebagai dampak pembangunan jalan tol diantaranya permasalahan hilangnya jalan penghubung yang biasa digunakan oleh warga baik Kelurahan Girian Permai, Pinokalan, Danowudu terputus karena dilintasi proyek sehingga menyulitkan transportasi warga yang biasa menggunakan jalan tersebut.

Dampak sosial pembangunan jalan tol di wilayah Kelurahan Girian Permai sesuai dengan penjelasan Lurah Girian Permai Ibu Topsin Janis diantaranya yaitu pada saat awal pembangunan konstruksi jalan tol ada sejumlah keluhan warga terkait luapan tanah campur air bekas proyek yang ditimbulkan karena pihak proyek belum membuat saluran air atau got. Akibat luapan air bercampur tanah yang terjadi khususnya pada saat hujan sangat mengganggu kenyamanan dan ketertiban lalu lintas.

Dampak lain yang dialami oleh warga masyarakat khususnya yang terdampak langsung yaitu harus pindah lokasi di luar wilayah Kelurahan Girian Permai dan sebagian kecil memilih lokasi atau rumah baru di wilayah Kelurahan Girian Permai. Karena harus berpindah lokasi maka menimbulkan persoalan seperti kesulitan mencari rumah baru, kemudian ada yang berhenti usahanya yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan. Selain itu keluhan lainnya yaitu adanya kebisingan yang diakibatkan kendaraan proyek maupun operasional alat berat yang cukup mengganggu ketenangan dan kenyamanan warga.

### **C. Kasus “Dampak Blasting” akibat pembangunan Jalan Tol Manado- Bitung di Kelurahan Girian Permai**

Blasting yaitu terjadinya ledakan-ledakan yang diakibatkan penggunaan bahan peledak pada pelaksanaan pembangunan konstruksi. Dampak blasting ini terhadap kerusakan bangunan bervariasi mulai dari retak ringan sampai retak parah, roboh sebagian sampai roboh total. Lurah Girian Permai, Ibu Topsin Janis, S.Sos menjelaskan bahwa rumah warga yang terdampak blasting sejumlah 39 KK dengan rincian 35 rumah warga mengalami kerusakan ringan sampai sedang dengan kerusakan yang bervariasi, 1 gedung gereja mengalami kerusakan cukup parah dan 3 rumah warga mengalami kerusakan yang parah.

Berdasarkan kesepakatan antara pihak proyek dan pemerintah kelurahan selanjutnya dilakukan pertemuan membahas kondisi dampak dan solusinya. Hasil pertemuan tersebut diantaranya bahwa pihak proyek bertanggungjawab terhadap kerusakan dan sanggup memperbaikinya. Selanjutnya pihak proyek akan memverifikasi data laporan warga untuk memastikan kebenaran data yang dilaporkan warga. Melalui verifikasi yang dilakukan pihak proyek hasilnya dipastikan bahwa data laporan warga masyarakat adalah benar diakibatkan kegiatan blasting. Selanjutnya pihak proyek menawarkan beberapa solusi penyelesaian. Dalam perbaikannya dilakukan sendiri oleh warga dengan menawarkan nominal ganti biaya perbaikan sebesar 1,5 juta rupiah per KK untuk kerusakan ringan dan sedang. Kemudian untuk kerusakan yang parah dan sangat parah akan ditangani oleh Tim Kerja proyek. Mengenai waktu perbaikannya disepakati bersama yaitu menunggu sampai selesainya kegiatan blasting pada lokasi kerja sehingga kerusakan tidak terjadi berulang.

### **D. Analisa Pembahasan Pengadaan Tanah pada Pembangunan Jalan Tol Manado- Bitung**

Pembangunan Jalan tol Manado-Bitung merupakan sejarah baru dalam pembangunan nasional khususnya bagi masyarakat di Sulawesi Utara karena untuk pertama kalinya ada pembangunan jalan tol di Sulawesi Utara dan merupakan suatu bukti pencapaian perkembangan dan kemajuan. Hal ini sesuai dengan teori Haryono yaitu pembangunan bertujuan untuk mencapai perkembangan dan kemajuan. Menurut Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey bahwa pembangunan jalan tol Manado-Bitung dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dan memungkinkan kegiatan

perekonomian lebih lancar, cepat dan mudah. Salah satu tujuan pembangunan jalan Tol ini sesuai Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol yaitu mendorong kemajuan wilayah. Adanya jalan tol akan mendorong berbagai kegiatan sektor ekonomi dan industri dan juga pengembangan wilayah. Dalam pembangunan jalan tol Manado-Bitung salah satu kegiatan yang sangat menentukan yaitu kegiatan pengadaan tanah. Pelaksanaan pengadaan tanah khususnya yang melintasi wilayah Kota Bitung dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II. Satker ini berkedudukan di bawah Direktorat Jalan bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan jalan tol Manado-Bitung dalam prosesnya melalui tahapan atau kegiatan-kegiatan yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil.

Kegiatan pengadaan tanah merupakan salah satu contoh kegiatan dalam pembangunan yang memiliki banyak aspek karena menyangkut kepentingan umum, hak asasi manusia dan hukum. Permasalahan pengadaan tanah di wilayah Bitung ini termasuk paling banyak dinamikanya dibanding dengan kegiatan yang sama di wilayah Kota Manado maupun di wilayah Kabupaten Minahasa Utara. Permasalahan dalam pengadaan tanah yang terjadi diantaranya yaitu (1) Permasalahan harga ganti rugi yang ditawarkan, (2) Permasalahan status tanah, (3) Permasalahan perbedaan hasil ukur lahan dan penetapan batas bidang tanah/sengketa batas, (4) Adanya perbedaan besaran ganti rugi antar bidang tanah, (5) Permasalahan pada proses pembayaran, (6) Adanya beberapa prasarana umum yang terkena pembebasan tanah seperti Gereja dan Mesjid. Selain itu juga adanya dinamika kasus yang cukup menyita perhatian khalayak yaitu adanya sumber mata aerujung yang dilintasi proyek.

Mengenai permasalahan ganti rugi yang ditawarkan ada yang menilai terlalu rendah. Dengan tawaran ganti rugi yang dinilai rendah maka akan merugikan masyarakat karena bagi yang terdampak langsung harus berpindah atau dengan kata lain harus mencari lahan atau rumah baru. Di sisi lain sebagai wilayah Kota harga tanah atau rumah di wilayah Kota Bitung saat ini mengalami peningkatan yang luar biasa. Oleh karena itu sudah selayaknya penawaran ganti rugi harus dapat menjamin warga masyarakat yang terdampak langsung dapat mengadakan lahan atau tanah yang baru untuk melangsungkan kehidupannya. Pada pengadaan tanah ada prinsip-prinsip yaitu kemanusiaan, demokratis dan adil. Dengan banyaknya rumah atau perumahan yang terkena pembebasan tentunya memiliki berbagai dampak. Dampak yang paling nyata yaitu kehilangan tanah atau rumah yang selama ini

dimilikinya atau ditempati sekian lamanya. Tanah atau rumah tersebut kemudian harus dilepas tentunya ada akibatnya seperti kehilangan hak miliknya yaitu tanah, harus mencari rumah atau lahan baru untuk bertempat tinggal.

Pada permasalahan status tanah yaitu masih adanya status tanah yang belum ada kepastian hukumnya mengenai kepemilikan atas tanah. Hal ini akan mempengaruhi siapa pihak yang berhak menerima ganti rugi atas pembebasan tanah yang artinya hal ini menyangkut persoalan hukum. Oleh karenanya permasalahan ini harus diselesaikan menurut aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya masalah adanya beberapa lahan yang terdapat perbedaan hasil ukur lahan dan penetapan batas bidang tanah/sengketa batas. Masalah ini nantinya akan mempengaruhi besaran ganti rugi yang diterima oleh karenanya hasil ukur lahannya harus akurat dan penetapan batas bidang tanah yang jelas. Penyelesaian masalah ini membutuhkan adanya dokumen administrasi yang baik sehingga kejelasannya terpenuhi dan melalui verifikasi sehingga tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Kemudian masalah adanya perbedaan besaran ganti rugi antar bidang tanah. Masalah ini sering dikeluhkan warga masyarakat karena perbedaan besaran ganti rugi terutama bagi yang merasa ganti rugi atas tanah miliknya lebih rendah. Dalam hal ini sangat ditentukan oleh kecermatan dari tim appraisal yang dibentuk oleh Panitia Pengadaan Tanah. Dalam hal ini sesuai dengan Undang Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pihak yang berhak menerima ganti rugi dapat mengajukan keberatan atas penawaran harga yang diberikan sampai ada kesepakatan.

Selanjutnya yaitu permasalahan pada proses pembayaran. Proses pembayaran tentunya harus melalui suatu tahapan administrasi yaitu verifikasi-verifikasi sampai dengan proses pembayaran yang memerlukan waktu yang lama. Di lain pihak warga masyarakat khususnya yang terdampak langsung harus berjuang untuk mengatasi persoalan barunya dan juga harus mengatasi kesulitan khususnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari selama belum menerima ganti rugi yang ditetapkan.. Hal ini tentunya memerlukan uang sehingga dengan belum menerima ganti rugi maka ada yang harus berhutang atau menempuh cara lain. Artinya proses yang lama ini berpotensi menimbulkan masalah baru yang juga merugikan warga masyarakat yang terkena dampak langsung.

Kemudian adanya permasalahan beberapa prasarana umum yang terkena pembebasan tanah seperti Gereja dan Masjid. Hal ini tentunya sangat terkait dengan kebutuhan dasar warga masyarakat yakni untuk melaksanakan peribadatan. Oleh karena itu sangat penting untuk mencegah menjadi permasalahan yang lebih besar maka perlu adanya

koordinasi dan komunikasi pihak-pihak yang terkait dan solusinya yaitu menyediakan sarana ibadah sementara yang representatif dan mengadakan sarana ibadah yang baru. Selain itu juga adanya dinamika kasus yang cukup menyita perhatian khalayak yaitu adanya sumber mata aerujang yang dilintasi proyek. Permasalahan ini menyangkut masalah lingkungan dan kebutuhan dasar bagi warga masyarakat yang menggunakannya. Oleh karena itu penyelesaiannya melalui musyawarah dengan menggeser lokasi konstruksi sehingga sumber air aerujang tetap dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih tetapi juga tidak menghambat pembangunan.

Pemerintah Kota Bitung, Pemerintah Kecamatan Girian sampai dengan Pemerintah Kelurahan Girian dalam menyelesaikan permasalahan yang ada senantiasa menjalankan perannya yaitu memfasilitasi penyelesaian melalui koordinasi-koordinasi dengan pihak-pihak terkait lain dan terjun langsung ke lapangan sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat diselesaikan.

#### **E. Analisa Pembahasan Dampak Sosial pada Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung**

Salah satu dampak yang paling menonjol yaitu dampak soaial. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel dampak sosial pembangunan jalan tol di Kelurahan Girian Permai sebagai salah satu wilayah yang dilintasi pembangunan jalan tol. Jumlah warga yang terdampak di wilayahnya sekitar 90-an KK . Dampak kegiatan pengadaan tanah diantaranya yaitu kehilangan kepemilikan atas tanah maupun rumah yang sebelumnya dimiliki atau ditempatinya walaupun kemudian mereka mendapatkan ganti kerugian tetapi tetap merasakan dampak tersebut. Terkait dengan hak ekonomi sebagai salah satu Hak Asasi Manusia maka ada jaminan setiap umat manusia mempunyai kemampuan untuk menyediakan dan menjaga standart hidup yang memadai secara konsisten dan bermartabat seperti yang dikemukakan oleh Jimly Asiddiqi. Para warga yang sudah kehilangan kepemilikan atas tanah atau lahannya tentunya harus dijamin dapat melanjutkan kehidupan mereka dengan pemberian ganti rugi. Sehingga mereka dapat merasakan kehidupan yang normal seperti semula atau bahkan lebih baik lagi.

Melalui pemberian ganti kerugian yang adil maka mereka warga yang terdampak tersebut mampu mengadakan rumah atau lahan yang baru. Tentunya pemberian ganti rugi ini juga harus dipertimbangkan secara ekonomi yang artinya secara jumlah atau besaran harus dapat mencukupi untuk membeli atau mengadakan yang baru. Besaran ganti rugi

yang diterima kemudian digunakan untuk membeli hunian baru serta biaya-biaya lainnya oleh karenanya besaran uang yang diterima warga yang telah melepas hak kepemilikan tanah atau rumah harus cukup untuk membeli hunian baru. Hal ini artinya sudah memenuhi kaidah jaminan setiap manusia mempunyai kemampuan untuk menyediakan dan menjaga standar hidup yang memadai. Kemudian warga atau keluarga tersebut juga masih dapat terpenuhi kebutuhannya akan pangan, kesehatan maupun pendidikan bagi anak-anaknya yang masih sekolah atau kuliah.

Dampak sosial yang juga dirasakan yaitu perubahan sosial yang dialami warga atau keluarga yang berpindah rumah. Akibat pindah rumah sebagai resiko harus dihadapi yaitu kondisi lingkungan yang baru sehingga perlu penyesuaian. Bagi yang berpindah lokasi dekat atau dekat di sekitar lokasi lama maka alasannya rata-rata yaitu ingin tetap menjalani aktivitas normal seperti biasanya karena pertimbangan pekerjaan, kelanjutan sekolah atau kuliah anak. Dalam hal ini perubahan lingkungan yang dihadapinya tidak terlalu besar sehingga mudah menyesuaikan diri. Alasan lainnya adanya keterikatan sosial dengan lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini sebagian besar sudah terikat misalnya dengan keanggotaan jemaat gereja atau rukun, grup pengajian, arisan yang dirasakan sangat kuat kekerabatan maupun ikatan persaudaraan. Kemudian yang harus berpindah jauh karena tidak ada pilihan lain artinya seseorang tersebut harus berpindah ke lingkungan yang baru dan berusaha untuk cepat beradaptasi menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang baru.

Dalam hal partisipasi sosial pada penelitian ini peneliti melihat dari aspek partisipasi dalam pembangunan khususnya pada pengadaan tanahnya serta pada partisipasi dalam arti kesempatan untuk turut bekerja pada proyek pembangunan. Pada proses tahapan pengadaan tanah sebagai bentuk pembangunan maka partisipasi masyarakat terlihat dengan jelas. Hal ini sangat logis karena masyarakat sebagai pihak yang memiliki atau sebagai obyek yang harus dilibatkan mulai dari tahap perencanaan sampai diperolehnya lahan atau tanah yang dibutuhkan untuk kepentingan pembangunan. Namun pada sisi lain partisipasi masyarakat dalam arti kesempatan turut bekerja di proyek sangat rendah sekali. Ada yang sudah melamar tetapi tidak diterima bekerja. Menurut penjelasan dari Satuan Kerja sebenarnya ada beberapa jenis pekerjaan yang ditawarkan oleh proyek. Berdasar penjelasan yang ada tersebut secara realitas memang kesempatan ikut bekerja sangat rendah. Hal ini diantaranya disebabkan jenis pekerjaan yang ada sebagian besar sangat teknis dan sudah ada tenaga teknis ini yang secara pengalaman sudah teruji. Dalam kegiatan pembangunan seperti ini tentunya kemajuan atau progress menjadi sangat penting sehingga kebutuhan

tenaga kerjanya juga sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian peluang yang diberikan oleh pihak proyek untuk ikut bekerja tidak terpenuhi karena alasan besaran upah yang tidak cocok dalam arti standar upahnya yang ditetapkan dianggap terlalu rendah. Terkait hal ini memang terjadi tidak hanya di pembangunan jalan tol Manado-Bitung tetapi di wilayah lain juga hampir sama kasusnya. Tentunya permasalahan ini tidak mudah solusinya karena menyangkut kebijakan. Tetapi disisi lain tentunya warga masyarakat juga berharap dapat ikut bekerja sehingga memperoleh penghasilan untuk menambah pendapatan.

Dampak sosial lain dengan adanya pembangunan jalan tol yaitu adanya keluhan-keluhan warga. Menurut Chavid Fandeli bahwa suatu proyek pembangunan apalagi yang berskala besar akan menimbulkan berbagai akibat. Pada pembangunan jalan tol pada umumnya berdampak pada lalu lintas, kebisingan, getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosialnya. Dampak lalu lintas belum terlalu dirasakan karena belum beroperasi jalan tol secara penuh. Saat ini sebagian ruas yaitu ruas Danowudu-Bitung belum beroperasi sehingga kondisi lalu lintas tidak banyak berubah masih menggunakan prasarana jalan yang lama. Sedangkan kebisingan sudah dirasakan oleh warga seperti di Kelurahan Girian Permai. Sebelum pembangunan jalan tol wilayah tersebut termasuk wilayah yang nyaman karena memang letaknya cukup jauh dari jalan utama Bitung-Manado maupun jalan 46 yang cukup ramai. Ketika pembangunan jalan tol dimulai maka aktivitas kendaraan khususnya proyek sangat tinggi intensitasnya. Operasional macam-macam kendaraan dan alat berat selain kebisingan juga getaran yang kuat sehingga kondisi jalan yang dilewati menjadi rusak karena beban yang lewat.

Salah satu dampak akibat pembangunan jalan tol Manado-Bitung di Kelurahan Girian Permai yang cukup menarik perhatian yaitu dampak *blasting*. Dampak yang diakibatkan oleh *blasting* ini dirasakan oleh warga masyarakat dan menimpa pada bangunan-bangunan baik gedung atau rumah milik warga masyarakat. Dari penjelasan Lurah Girian Permai, Ibu Topsin Janis, S.Sos aktivitas *blasting* pada proyek pembangunan jalan tol tersebut beberapa warga di wilayahnya melaporkan terkena dampak *blasting*. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan setempat memperdulikan keadaan yang dialami dan dirasakan oleh masyarakat dan memfasilitasi agar permasalahan tersebut dapat diatasi. Demikian halnya dengan peran aparat keamanan dalam hal ini Babinkamtibmas dan Babinsa yang mengambil langkah cepat untuk mengawal permasalahan yang dialami oleh warga sehingga menemukan solusi yang baik. Selanjutnya dalam penyelesaiannya terlihat pentingnya data yang valid dan dapat dipercaya oleh pihak yang berkepentingan. Hal ini

sangat baik sehingga tidak disalah manfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Misalnya melaporkan keadaan yang berlebihan untuk memperoleh ganti kerugian yang lebih banyak. Pada penyelesaiannya sangat penting melaksanakan koordinasi yang baik dan mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya oleh Uswatun Khasanah diantaranya yaitu pada peluang usaha bagi pelaku usaha untuk membuka usaha di sekitar lokasi pembangunan jalan tol belum nampak secara nyata yang diakibatkan masih belum selesainya proyek pembangunan jalan tol secara keseluruhan. Dari aspek penurunan pendapatan yang dirasakan terjadi kepada warga masyarakat yang terdampak langsung ada yang harus berganti pekerjaan atau juga usahanya berhenti sementara. Bagi warga yang tidak terdampak langsung masih dapat menjalankan aktivitas pada pekerjaan sebelumnya atau tidak hilang pekerjaannya.

Kemudian ditinjau aspek harapan mengurangi pengangguran tidak tercapai yang disebabkan oleh kecilnya peluang bekerja pada proyek pembangunan yang dilaksanakan. Sedangkan pada aspek pembangunan yang berwawasan lingkungan yaitu adanya kerusakan atau hilangnya beberapa prasarana dan akses serta sumber daya alam. Kemudian dari aspek perubahan sosial yang dialami lebih kompleks masalahnya karena sebagian besar pembebasan tanah terjadi di wilayah yang merupakan perumahan/permukiman. Namun demikian bahwa dampak pembangunan khususnya dampak sosial merupakan suatu keniscayaan yang harus terjadi, dihadapi dan diselesaikan.

#### **4. Kesimpulan**

Pada kegiatan pengadaan tanah pada pembangunan jalan tol Manado-Bitung di wilayah Kota Bitung telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan per-undangundangan yang berlaku walaupun dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan-permasalahan dan telah dapat mencapai tujuan yang diharapkan yaitu diperolehnya lahan/tanah yang dibutuhkan. Selanjutnya ada berbagai dampak pembangunan jalan tol Manado-Bitung diantaranya hilangnya sarana dan prasarana yang mengganggu aktivitas masyarakat, adanya keluhan masyarakat seperti luapan air campur tanah, kebisingan, kerusakan lingkungan dan dampak blasting. Kemudian terdapat dampak sosial seperti perpindahan lokasi tempat tinggal, perubahan lingkungan sosial, kesulitan melanjutkan usaha dan rendahnya kesempatan bekerja di proyek pembangunan. Rekomendasi terkait permasalahan pengadaan tanah dan dampak

sosial tersebut yaitu meningkatkan harga ganti rugi atas lahan atau tanah untuk menjamin kelangsungan hidup yang lebih baik, melaksanakan konsultasi public secara lebih intensif, percepatan proses pembayaran ganti rugi dan mempercepat pengadaan sarana ibadah untuk mengganti sarana ibadah yang terkena pembebasan.

## 5. Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2016. *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas
- Budiman, Arif 2000, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
- Burhan Bungin, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Fandeli, Chafid, 2011, *Analisis Mengenai Dampak lingkungan Prinsip Dasar Dalam Pembangunan*, Yogyakarta, Liberty Offset
- Haryono, Paulus, 2010, *Perencanaan Pembangunan Kota dan Perubahan Paradigma*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Heny, Andi Nurdin, 2019. *Pengembangan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi di Indonesia*. Bandung : CV Cendekia Press
- Iwan Nugroho, 2012. *Pembangunan Wilayah (Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan, LP3ES*.
- Koentjoroningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Lexi J Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya
- Marzali, Amri, 2005, *Antropologi dan Pembangunan Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup
- Ndraha, Taliziduhu, 2010, *Kybernologi : Hak Asasi Manusia dan Kepamongpraajaan*, Yogyakarta, Sirao Credentia Center
- Riduwan, 2013, *Metode dan Tehnik Menyusun Proposal Penelitian*, Bandung : Alfabeta
- Rahardjo, Adisasmita, 2006, *Membangun Desa Partisipatif*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Subandi, 2012, *Ekonomi Pembangunan*, Bandung : Alfabeta
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Sukirno, Sadono, *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, Jakarta : Fajar Interpratama Mandiri
- Patilima, Hamid, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.

- Pusat Bahasa Depdiknas , *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* , Jakarta , Balai Pustaka
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Irfantri Mahaputra 2018 *Skripsi, Analisis Dampak Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera terhadap Sosial ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan* , Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Triana Rossalina Noor, Ali Hamdan, Saifuddin, M Athoiful Fanan, *Prosiding Seminar Nasional dan Temu Imiah Jaringan Peneliti, Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto (Studi Kasus Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Wringin Anom, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik*
- Ushwathun Khasanah, Nurhadji Nugraha, Wawan Kokotiasa 2017 *Jurnal Sosial Ekonomi, Dampak Pembangunan Jalan Tol Solo-Kertosono Terhadap Hak Ekonomi Masyarakat Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, Universitas PGRI Madiun*
- Victorianus Aries Siswanto, Tri Pudji Wahjuningsih, Murtini, 2019 *Jurnal Litbang Kota Pekalongan, Dampak Pembangunan Jalan Tol Terhadap Faktor Sosial, Ekonomi dan Lingkungan pada usaha Batik dan Perhotelan di Kota Pekalongan, STIMIK Widya Pratama Pekalongan*
- Vina Maria Ompusunggu, *Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi masyarakat di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi Universitas Quality Medan*
- Undang Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Undang Undang No 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).